

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini melihat kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirancang untuk menyediakan makanan bergizi secara gratis kepada kelompok sasaran terutama anak usia sekolah dan kelompok rentan seperti ibu hamil sebagai upaya intervensi gizi demi menurunkan angka kekurangan gizi dan stunting serta mendukung tumbuh-kembang dan prestasi pendidikan. Secara konseptual MBG menggabungkan dimensi kesehatan publik seperti pemberian nutrisi yang cukup, pendidikan dalam peningkatan konsentrasi dan prestasi siswa melalui pemenuhan kebutuhan gizi, serta ekonomi lokal yang dapat mendukung rantai pasok lokal petani, UMKM dan dapur komunal. Landasan normatif dan kebijakan MBG mengacu pada kewajiban negara untuk menjamin hak atas pangan dan gizi serta pada target pembangunan sumber daya manusia (SDM) jangka panjang; operasionalnya ditempatkan dalam kerangka koordinasi lintas-sektor antara Badan Gizi Nasional, kementerian/lembaga terkait, dan pemerintah daerah.

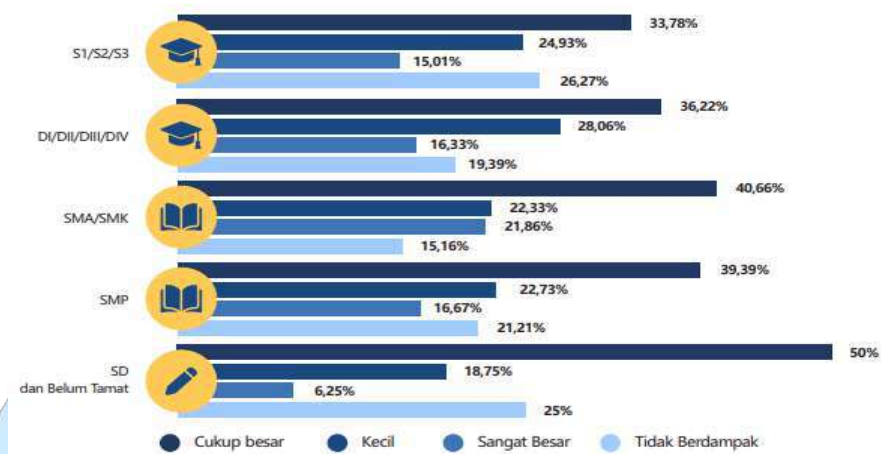
Makanan Bergizi Gratis sejauh mana memberikan manfaat dalam memperbaiki gizi anak sekolah di Indonesia dan kelompok rentan 3B (Ibu menyusui, Ibu hamil dan anak balita non PAUD), terutama dalam menanggulangi permasalahan seperti stunting dan beban ganda malnutrisi (underweight dan overweight). Fakta dilapangan menunjukkan bahwa konsep stunting dan malnutrisi

masih menjadi pengetahuan yang mewah dan terbatas di kelompok masyarakat akar rumput(Prasetyo, 2021).

Pemerintah mengklaim bahwa hingga awal Oktober 2025 program MBG telah menjangkau 22 sekitar 1,3 juta ibu hamil, ibu menyusui dan balita (Prameswari, 2025). kelompok kunci dalam periode 1.000 HPK yang menjadi sasaran utama upaya pencegahan stunting. Namun, cakupan tersebut masih 23 sangat terbatas pada kalangan siswa (sekitar 3,1% dari total 41,6 juta siswa) (Setuningsih & Dirgantara, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa kelompok paling rentan justru belum menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan MBG, padahal intervensi gizi pada masa HPK memiliki pengaruh paling besar terhadap pencegahan stunting serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Makan Bergizi Gratis belum mampu memperbaiki gizi anak dan kelompok rentan menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap dampak program MBG dalam pencegahan stunting bervariasi menurut tingkat pendidikan. Responden berpendidikan S1–S3 mencatat persentase tertinggi pada kategori tidak berdampak (26,27%), diikuti oleh lulusan SD atau belum tamat (25%) dan SMP (21,21%). Sementara itu, kelompok dengan pendidikan D1–D4 serta SMA/SMK masing-masing mencatat 19,39% dan 15,16%.

Gambar 1.1 Asumsi MBG Bisa Mencegah Stunting Berdasarkan Tingkat Pendidikan



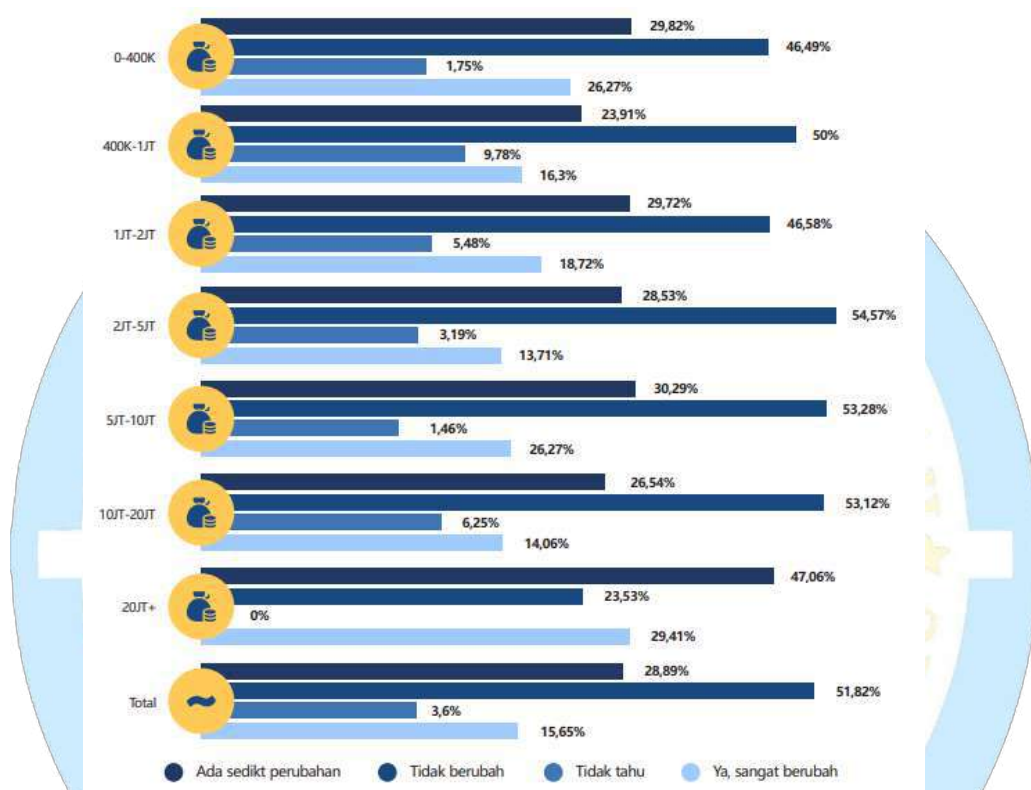
Sumber: Survei CELIOS (Askar et al., 2025)

Tingginya proporsi responden berpendidikan tinggi yang menilai program MBG tidak berdampak dapat mencerminkan pandangan kritis terhadap keadilan sasaran program. Banyak dari mereka mungkin merasa bahwa program seperti MBG seharusnya difokuskan pada kelompok yang benar-benar membutuhkan, yakni masyarakat berpendapatan rendah atau anak-anak dengan risiko stunting tinggi, bukan diberikan secara merata tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kebutuhan penerima. Dalam pandangan ini, MBG dinilai kehilangan arah sebagai intervensi sosial yang tepat sasaran, karena justru berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran dan menurunkan efektivitas kebijakan. Kritik ini menyoroti kesadaran kelas menengah dan berpendidikan tinggi terhadap pentingnya targeted policy, di mana bantuan publik diberikan secara selektif agar benar-benar

berdampak pada penurunan stunting, bukan sekadar menciptakan kesan pemerataan semu.

Keberhasilan program pemberian makanan gratis di sekolah dapat dilihat dari bagaimana program ini mendukung perkembangan anak secara menyeluruh, mencakup tidak hanya perbaikan status gizi, tetapi juga peningkatan kesiapan belajar serta pembentukan perilaku positif anak di sekolah, seperti keaktifan, tingkat fokus dan rajin (Xhonneux et al., 2022). Studi ini menemukan bahwa 51,86% responden menilai tidak ada perubahan tingkat keaktifan dan fokus anak di sekolah setelah menerima MBG. Di lain sisi, sekitar 29% responden melihat ada sedikit perubahan pada anaknya. Sedangkan, hanya 16% responden menyatakan bahwa anaknya menjadi lebih aktif dan fokus. Hal menarik lainnya, analisis deskriptif ini menunjukkan persepsi responden hampir semua di tingkat pendapatan, menyatakan tidak ada perubahan perilaku belajar anak di sekolah setelah menerima MBG. Terutama pada responden berpenghasilan 2–5 juta rupiah per bulan, kelompok yang berada di posisi menengah-bawah justru paling banyak menyatakan bahwa anak mereka tidak mengalami perubahan dalam keaktifan maupun fokus di sekolah. Temuan ini menandakan perlunya evaluasi lebih mendalam untuk memastikan program MBG benar-benar memberikan manfaat untuk anak-anak yang tinggal di rumah tangga dengan ekonomi rentan.

Gambar 1. 2 MBG dan Persepsi Orang Tua Bahwa Anak Lebih Fokus dan Aktif Di Sekolah



Sumber: Survei CELIOS (Askar et al., 2025)

Selain belum menunjukkan dampak berarti terhadap keaktifan dan fokus anak di sekolah, program MBG juga tidak menghasilkan perubahan yang signifikan pada perilaku rajin anak. Sebanyak 55 % responden menyatakan bahwa perilaku rajin anak mereka tetap sama, tanpa peningkatan yang terasa. Studi ini mengindikasikan rendahnya efektivitas program dalam mendorong perubahan perilaku rajin anak di sekolah pada penerima manfaat berdasarkan pengamatan. Pola ini konsisten di

hampir semua tingkat pendapatan, di mana mayoritas responden melaporkan tidak ada perubahan perilaku anak.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah pusat Republik Indonesia yang muncul sebagai respons atas tantangan gizi nasional dan upaya mewujudkan visi *Indonesia Emas 2045*. Narasi resmi pemerintah menggambarkan MBG bukan sekadar kebijakan pangan, melainkan strategi pembangunan manusia yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pemenuhan gizi seimbang bagi kelompok rentan. Berdasarkan keterangan resmi dari laman (Amrin, 2025), MBG dirancang untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi memadai sejak dini sebagai fondasi pembangunan bangsa yang sehat, cerdas, dan produktif. Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto menegaskan bahwa MBG merupakan bentuk nyata negara hadir dalam memenuhi hak dasar warga negara atas gizi, kesehatan, dan pendidikan, serta memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi daerah.

Kerangka narasi kebijakan, pemerintah pusat menarasikan MBG sebagai kebijakan sosial transformatif yang mengintegrasikan aspek gizi, pendidikan, dan ekonomi lokal. Melewati Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, dan Badan Gizi Nasional, MBG diluncurkan secara nasional pada Januari 2025 sebagai program lintas sektoral dengan melibatkan banyak aktor, seperti sekolah, pesantren, pelaku UMKM, petani, dan nelayan lokal (Purwowidhu, 2025). Narasi pemerintah menempatkan MBG sebagai instrumen kebijakan publik yang menjembatani isu

gizi dan pembangunan manusia dengan pemerataan ekonomi daerah. Hal ini sejalan dengan visi “Membangun SDM Unggul, Indonesia Maju”, di mana program MBG bukan hanya dimaknai sebagai distribusi makanan gratis, tetapi juga investasi jangka panjang untuk menurunkan prevalensi stunting, memperbaiki capaian pendidikan, serta memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi nasional. Tujuan utama pemerintah dalam melaksanakan MBG berfokus pada lima dimensi strategis, yakni perbaikan status gizi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, pemberdayaan ekonomi lokal, penguatan ketahanan pangan, dan pengurangan beban keluarga miskin. Dengan menyediakan makanan bergizi setiap hari di sekolah dan lembaga pendidikan keagamaan, pemerintah berharap dapat meningkatkan konsentrasi belajar, kehadiran siswa, dan prestasi akademik. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan mampu menciptakan generasi produktif yang berdaya saing global. Seperti disampaikan oleh (Isnur, 2025), kebijakan MBG merupakan investasi sosial yang berorientasi pada pembangunan manusia dan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) nasional.

Selain meningkatkan kualitas gizi dan pendidikan, pemerintah juga menekankan dimensi ekonomi lokal dalam kebijakan MBG. Berdasarkan laporan (Amrin, 2025), sekitar 85% dana program MBG dialokasikan untuk membeli bahan baku makanan dari produk pertanian lokal, dengan 95% di antaranya berasal dari hasil petani dan nelayan daerah. Pola distribusi ini dimaksudkan untuk memperkuat rantai pasok pangan domestik, mendukung swasembada pangan, dan membuka lapangan kerja baru. Kementerian Sekretariat Negara mencatat bahwa MBG berpotensi menciptakan lebih dari 290 ribu lapangan kerja baru di sektor pangan

dan distribusi logistik nasional (Setneg, 2025). Hal ini memperlihatkan bahwa MBG tidak hanya berdampak pada dimensi gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal yang mendukung ketahanan ekonomi nasional. Dari perspektif sosial, MBG juga bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, memperkuat solidaritas sosial, dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Program ini dipandang sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk memperkecil kesenjangan sosial, terutama di daerah tertinggal dan rawan pangan. Sebagaimana diungkapkan oleh (Miftahudin, 2025), program MBG menjadi salah satu kebijakan yang mendapat respons positif dari masyarakat karena manfaatnya dirasakan langsung oleh keluarga penerima. Pemerintah berharap melalui MBG dapat tercipta generasi yang sehat, kuat, dan produktif sebagai modal sosial menuju Indonesia yang berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, secara naratif dan empiris, MBG dikonstruksikan sebagai kebijakan publik yang berlandaskan pada prinsip keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan pembangunan manusia berkelanjutan.

Sejak peluncuran MBG pada awal 2025, sejumlah kejadian dugaan keracunan makanan di sekolah dilaporkan di berbagai daerah. Gejala yang dilaporkan sebagian besar bersifat akut (mual, muntah, diare, pusing) dan kasus-kasus awal (Januari - Juni 2025) umumnya diidentifikasi sebagai akibat pengolahan yang tidak sempurna (mis. daging/ayam kurang matang), penyimpanan/delivery yang buruk, atau masalah tata kelola dapur mitra. Kasus-kasus ini memicu kekhawatiran publik terhadap keamanan pangan MBG dan menuntut peningkatan pengawasan mutu pada rantai penyediaan makanan. Berikut sedikit gambaran data terhadap beberapa

sekolah yang mengalami kasus keracunan pada awal bulan Januari hingga Juni 2025 yang terverifikasi dari laporan media & BGN.

Tabel 1.1 Kasus-kasus keracunan Makanan Bergizi Gratis (Januari-Juni 2025)
ringkasan terverifikasi dari laporan media & BGN

Tanggal (2025)	Lokasi (provinsi)	Tempat / subjek	Jumlah korban (laporan media)
16 Jan 2025	Sukoharjo, Jateng	SDN Dukuh 03	40 siswa (mual, muntah, pusing) (Jateng, 2025)
19–22 Feb 2025	Pandeglang, Banten	SDN Alaswangi 2	28–40 siswa (mual, diare, muntah) (Katadata, 2025)
18 Feb 2025	Waingapu, Sumba Timur	SD Katolik Waingapu	29 siswa (mual, keluhan rasa makanan basi) (Katadata, 2025)
18 Apr 2025	Batang, Jateng	SDN Proyonanggan 5	60 siswa (mual, sakit perut) (Katadata, 2025)
21–22 Apr 2025	Cianjur, Jabar	MAN 1 & SMP PGRI 1	Kombinasi: 23 siswa SMP + 55 siswa MAN (total ~78) dilaporkan (BGN, 2025)
23 Apr 2025	Bombana, Sultra	SDN 33 Kasipute	52 anak dirawat/ringan (Katadata, 2025)
Mei 2025 (pertengahan)	Bogor, Jabar	beberapa jenjang: TK–SMA	Laporan menyebut ratusan (Katadata menyebut 223 dalam satu peristiwa yang

			dilaporkan) (Katadata, 2025)
--	--	--	------------------------------

Sumber : Olahan Data Penelitian 2025



Berdasarkan data di atas menunjukkan pada awal Januari sampai Juni 2025 terdapat banyak sekali kasus keracunan yang terjadi pada anak-anak sekolah bahwa dari permasalahan tersebut memunculkan adanya kritikan dari masyarakat terutama orang tua, guru, dan masyarakat lokal di sekitar sekolah menunjukkan rasa kecewa, khawatir, dan kehilangan kepercayaan pada pelaksanaan program MBG. Insiden berulang seperti keracunan massal membuat banyak orang tua menuntut transparansi dan pertanggungjawaban dari pemerintah dan penyelenggara. Sementara itu desakan organisasi sipil / NGO untuk evaluasi atau moratorium beberapa LSM dan jaringan pemantau pendidikan memberikan tekanan publik ada seruan agar pemerintah mengevaluasi tata kelola MBG atau menghentikan sementara (moratorium) bila masalah berulang. Pada fase setelah Juni 2025 desakan ini menjadi lebih terorganisir, namun sejak April–Mei 2025 tuntutan audit/peninjauan sudah mulai muncul (Saminarsih, 2025). Lebih spesifik, banyak masyarakat merasa bahwa standar keamanan pangan dan distribusi belum dijalankan dengan baik, yang memunculkan kecemasan bahwa anak-anak mereka bisa menjadi korban. Pengamat kesehatan masyarakat menyebut bahwa masyarakat mendesak agar pemerintah membangun sistem pengaduan terbuka dan pengawasan yang lebih ketat karena mereka merasa selama ini hanya sebagai penerima pasif tanpa akses memantau sendiri prosesnya (Budiono, 2025).

Selain itu, gelombang kritik terhadap kebijakan pelaksanaan program tampak muncul. Misalnya lembaga think-tank seperti *Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives* (CISDI) mendesak pemerintah untuk mengevaluasi total program MBG setelah mencatat ribuan kasus

keracunan, menyebut bahwa jumlah yang dilaporkan sebagian kecil namun ribuan kasus lain dilapangan, terutama gejala ringan atau tidak lapor ke fasilitas kesehatan, diperkirakan jauh lebih besar dari data Hal ini menandakan bahwa masyarakat dan organisasi sipil mulai mempertanyakan kelayakan dan kesiapan program secara keseluruhan (Simamora, 2025). Kecemasan masyarakat juga tidak hanya soal kejadian kesehatan, tetapi juga soal reputasi program dan dampak sosial: ketika program yang digadang-gadang untuk menyejahterakan justru menimbulkan insiden, maka terjadi keretakan kepercayaan pada negara dan lembaga-penyelenggara. Kepala BGN menyebut bahwa delapan masalah utama ditemukan terkait MBG termasuk maraknya kasus keracunan massal yang menimbulkan risiko turunnya kepercayaan publik.

Respon pemerintah terhadap berbagai reaksi masyarakat atas insiden keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan pola komunikasi ganda: di satu sisi berupaya menenangkan publik dengan janji tanggung jawab dan perbaikan sistem, di sisi lain menegaskan keberlanjutan program sebagai prioritas nasional. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) secara terbuka mengakui adanya kelemahan pada tahap implementasi dan meminta maaf kepada masyarakat atas terjadinya beberapa kasus keracunan yang menimpa penerima manfaat di sejumlah daerah. Kepala BGN dalam pernyataannya menegaskan bahwa pihaknya memohon maaf kepada masyarakat atas kejadian yang tidak diinginkan tersebut dan memastikan bahwa seluruh korban telah mendapat penanganan medis dengan biaya ditanggung sepenuhnya oleh

pemerintah, sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap keselamatan anak-anak penerima program (Fatunnisa, 2025; Werdiningsih, 2025).

Meskipun tekanan publik cukup kuat, terutama dari kalangan orang tua dan organisasi masyarakat sipil yang meminta evaluasi total bahkan penghentian sementara program, pemerintah tetap bersikap teguh mempertahankan keberlanjutan MBG. Kepala BGN menyebut bahwa kasus keracunan yang terjadi hanya mencakup sebagian kecil dari total penerima manfaat dan tidak sebanding dengan manfaat besar program bagi jutaan anak sekolah di Indonesia (Prasetyo, 2025). Pemerintah menegaskan bahwa MBG adalah program prioritas Presiden yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga penghentian program dinilai bukan solusi.

Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Prabowo–Gibran menjadi salah satu isu paling hangat dalam diskursus publik Indonesia. Program ini dirancang dengan anggaran besar, yakni sekitar Rp71 triliun pada tahun 2025, untuk menyediakan makanan bergizi bagi 19,47 juta anak sekolah serta ibu hamil dan menyusui. Harapannya, kebijakan ini dapat menjawab persoalan klasik bangsa, yaitu tingginya angka kekurangan gizi dan stunting yang dialami oleh keluarga miskin. mencatat bahwa 57% masyarakat Indonesia tidak mampu membeli makanan bergizi seimbang, sehingga secara faktual, kebutuhan terhadap intervensi negara dalam pemenuhan gizi sangat mendesak. Di satu sisi, dukungan masyarakat sangat besar: 50% menginginkan program segera dijalankan, dan mayoritas percaya program ini akan meningkatkan kehadiran siswa di sekolah.

Akan tetapi, dukungan ini diiringi kritik tajam dari masyarakat. Misalnya, 46% responden mengkhawatirkan inefisiensi distribusi, 37% khawatir risiko korupsi, serta sebagian menilai kebijakan ini berpotensi salah sasaran karena juga akan dinikmati anak-anak dari keluarga mampu. Dengan demikian, wacana publik terkait MBG memperlihatkan dinamika antara optimisme atas manfaat kesehatan dan skeptisisme terhadap kapasitas negara dalam implementasi. Dengan melihat dinamika tersebut, jelas bahwa MBG merupakan kebijakan strategis yang berada di persimpangan antara urgensi gizi nasional, tantangan fiskal, risiko tata kelola, serta legitimasi politik. Analisis wacana terhadap kebijakan ini menjadi relevan, sebab dapat mengungkap bagaimana pemerintah membingkai program, bagaimana masyarakat meresponsnya, dan bagaimana relasi kuasa terbentuk dalam diskursus publik seputar pemenuhan gizi di Indonesia (Askar, 2025).

Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program baru berskala nasional yang memiliki tujuan strategis dalam peningkatan gizi, pendidikan, dan ekonomi lokal. Namun, hingga kini, sebagian besar kajian terkait MBG masih berfokus pada aspek implementasi teknis dan efektivitas program, seperti distribusi makanan, kualitas gizi, serta manajemen rantai pasok pangan. Kajian yang menganalisis dimensi wacana publik, yakni bagaimana pemerintah, media, dan masyarakat membingkai serta merespons kebijakan tersebut, masih sangat terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang memadukan analisis wacana kebijakan dengan teori sistem kebijakan untuk melihat bagaimana masukan publik, proses konversi kebijakan, dan umpan balik sosial memengaruhi legitimasi kebijakan MBG di ruang publik. Padahal, pada konteks kebijakan sosial yang baru dan sensitif

seperti MBG, legitimasi publik dan narasi kebijakan menjadi faktor penting yang menentukan keberlanjutan program. Dengan demikian, terdapat kesenjangan konseptual dan empiris dalam memahami hubungan antara diskursus publik, narasi pemerintah, dan respon masyarakat dalam membentuk legitimasi kebijakan MBG.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan analitis yang mengintegrasikan teori sistem kebijakan dengan analisis wacana empiris terhadap kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam konteks diskursus publik Indonesia. Selama ini, kajian terhadap MBG masih terbatas pada aspek implementatif, seperti efektivitas pelaksanaan, distribusi makanan, dan manajemen anggaran, sedangkan dimensi wacana kebijakan yang merepresentasikan bagaimana pemerintah, media, dan masyarakat membentuk serta memperdebatkan makna kebijakan tersebut belum banyak diteliti secara mendalam. Penelitian ini menghadirkan perspektif baru dengan mengamati bagaimana konstruksi narasi pemerintah tentang MBG berinteraksi dengan respon masyarakat dan wacana media dalam membentuk legitimasi kebijakan. Selain itu, kebaruan penelitian ini juga terletak pada upayanya memetakan dinamika perubahan wacana publik sejak fase peluncuran hingga munculnya insiden sosial seperti kasus keracunan massal yang memicu kritik masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendokumentasikan opini publik, tetapi juga menguraikan hubungan timbal balik antara komunikasi kebijakan, persepsi sosial, dan legitimasi politik dalam pelaksanaan kebijakan publik berskala nasional.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana diskursus publik yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan MBG?
2. Bagaimana respon pemerintah terhadap diskursus publik dalam kebijakan MBG?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana wacana kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) dibingkai, dikonstruksikan, dalam ruang publik. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pemerintah membangun wacana kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam ruang publik serta menganalisis respons publik yang muncul terhadap kebijakan tersebut. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai hubungan dan interaksi antara wacana pemerintah dan wacana publik dalam membentuk legitimasi kebijakan MBG. Melalui analisis tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana pemerintah mempertahankan legitimasi kebijakan melalui berbagai narasi dan respons terhadap kritik maupun dukungan yang berkembang di masyarakat. Melalui pendekatan teori sistem kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan hubungan antara masukan publik (*public input*), proses konversi kebijakan (*policy conversion*), keluaran kebijakan (*policy output*), dan umpan balik sosial (*feedback*) dalam siklus kebijakan MBG. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berorientasi pada analisis teks, tetapi juga pada pemahaman empiris

mengenai bagaimana diskursus publik memengaruhi stabilitas dan efektivitas kebijakan sosial.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian kebijakan publik di Indonesia dengan menggabungkan dua kerangka konseptual utama, yaitu teori sistem kebijakan dan analisis wacana kebijakan. Integrasi ini memperkaya literatur kebijakan publik yang selama ini cenderung menitikberatkan pada dimensi administratif dan implementatif, dengan menambahkan dimensi komunikasi, legitimasi, dan konstruksi sosial dari kebijakan itu sendiri. Melalui studi kasus kebijakan MBG, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa keberhasilan sebuah kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh rancangan dan pelaksanaannya, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan, dipersepsikan, dan dimaknai oleh publik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan konseptual bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang menelaah dinamika wacana, legitimasi, dan partisipasi publik dalam kebijakan sosial.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung bagi pemerintah, lembaga pelaksana kebijakan, dan masyarakat. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merancang strategi

komunikasi kebijakan publik yang lebih transparan, partisipatif, dan berorientasi pada respons publik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Bagi lembaga pelaksana kebijakan seperti Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pendidikan, dan pemerintah daerah, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola dan pengawasan mutu dalam pelaksanaan program MBG. Selain itu, bagi organisasi masyarakat sipil dan media, penelitian ini menyediakan wawasan empiris untuk memperkuat peran mereka dalam mengawasi, mengkritisi, dan memberikan masukan terhadap kebijakan publik. Adapun bagi masyarakat akademik, penelitian ini menjadi inspirasi metodologis dalam mengembangkan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis wacana dan teori sistem kebijakan sebagai alat analisis yang komprehensif dalam menilai dinamika kebijakan sosial di Indonesia.

